

ABSTRAK

- (A) Nama : Dony Saputra (205160165)
- (B) Judul Skripsi : ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PN NO. 316/PDT.SUS-BPSK/2020/PN BTM MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK NOMOR 011/PK-ARB/BPSK/IX/2020).
- (C) Halaman : vi + 101 halaman.
- (D) Kata Kunci : Putusan, BPSK, Perlindungan Konsumen
- (E) Isi Abstrak :
BPSK sebagai lembaga yang mengurus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha memiliki putusan yang bersifat final dan binding berdasarkan Pasal 54 ayat 3 UU 8/1999. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UU 8/1999, ditemukan celah bahwa terhadap putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri. Tidak sampai di Pengadilan Negeri saja, putusan BPSK juga dapat diajukan kasasi ke MA. Hal tersebut menunjukkan adanya pasal-pasal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Lalu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan putusan BPSK pada perkara dengan putusan PN Batam No. 316/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN BTM? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan kepastian dan menentukan ruang lingkup terhadap pengajuan keberatan atas putusan BPSK, MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2006 yang secara garis besar menjelaskan ruang lingkup dan tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK. Kemudian sehubungan dengan studi kasus yang diangkat oleh penulis, diketahui bahwa Majelis Hakim PN Batam mengambil yurisprudensi sebagai acuan pertimbangan hukum untuk memutus perkara yang ada. Selain itu, diketahui juga bahwa dalam perjanjian para pihak sudah mengatur forum
- (F) Acuan : 39 (1976 – 2015).
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly S.H, M.H., APU
- (H) Penulis : Dony Saputra